

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 3, Nomor 2, Januari - Juni 2011

Diterbitkan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS)

Sekretariat: Nurcholish Madjid Society

Graha STR, Lt. 4, Jl. Ampera Raya No. 11, Kemang

Jakarta Selatan 12550

E-mail: titik.temu@yahoo.com

Pemimpin Redaksi

Kautsar Azhari Noer

Sekretaris Redaksi

Fachrurozi • Sunaryo

Redaktur Pelaksana

Muhamad Wahyuni Nafis • Abdul Hakim

Dewan Redaksi

Abdul Hakim • Budhy Munawar-Rachman •

Fachrurozi • Kautsar Azhari Noer • Moh. Monib •

Muhamad Wahyuni Nafis • Sunaryo •

Yudi Latif • Zainun Kamal

Pewajah Sampul

Taqi Kanara

Pewajah Isi

Moh. Syu'bi

Titik-Temu terbit setiap enam bulan. Redaksi menerima tulisan ilmiah dari kalangan manapun dan berhak menyunting, memperbaiki dan menyempurnakan naskah tulisan yang diterima. Naskah tulisan berkisar antara 15-25 halaman kuarto dengan ketikan spasi ganda dan dikirim via e-mail.

TITIK-TEMU, Vol. 3, No. 2, Januari - Juni 2011

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 3, Nomor 2, Januari - Juni 2011

DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi	1
Daftar Surat al-Qur'an	3-4
Cuplikan dari Wirid Ibn 'Arabi	5-8
Menyatukan Kata dan Perbuatan	9
Pengantar	11-17

SAJIAN KHUSUS

Demokrasi, Demokratisasi, dan Oposisi <i>Nurcholish Madjid</i>	21-30
Nurcholish Madjid, Sosok Pribadi Pengimbang <i>Muhamad Wahyuni Nafis</i>	31-42

ARTIKEL

Islam dan Demokrasi <i>M. Dawam Rahardjo</i>	45-61
Yoga — Seni Melepaskan Kebiasaan yang Mengekang: Meraih Keunggulan Pribadi melalui <i>Bhagavad Gita</i> <i>Swami Sukhabodhananda</i>	63-75
Agama Langit versus Agama Bumi: Sebuah Telaah atas Klasifikasi Agama-agama <i>Kautsar Azhari Noer</i>	77-101

DAFTAR ISI

Reformasi Syari'ah sebagai Jalan menuju Penghargaan Hak Asasi Manusia <i>Arif Susanto</i>	103-118
---	---------

Kebebasan Beragama dalam Perspektif Negara dan Hak Asasi Manusia <i>M.M. Billah</i>	119-166
---	---------

RESENSI BUKU

Jalan Spiritual menuju Taman Kebenaran <i>Irfan Permana Putra</i>	169-173
--	---------

Mencari Titik Temu, Mencipta Harmoni <i>Julmansyah Putra</i>	175-179
---	---------

MAKLUMAT

Susunan Pengurus Nurcholish Madjid Society	183-184
Ucapan Terima Kasih	185
Pembetulan	186
Berlangganan <i>Titik-Temu</i>	187

NURCHOLISH MADJID, SOSOK PRIBADI PENGIMBANG

Muhamad Wahyuni Nafis

Memberikan tanggapan untuk artikel Nurcholish Madjid berjudul “Demokrasi, Demokratisasi dan Oposisi” yang ditulisnya pada kesempatan Seminar di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) di Jakarta pada Rabu, 7 Februari 1994, membuat penulis mengingat-ingat berbagai bahan, hasil wawancara dan berbagai tanggapan yang pernah muncul berkenaan dengan ide demokrasi dan oposisi yang pernah mengemuka di Tanah Air. Meski artikel tersebut ditulis pada 1994, ide itu mengemuka secara nasional ke publik setelah selang waktu hampir dua tahun kemudian, tepatnya pada September 1995. Ide itu menyeruak ke permukaan karena ada istilah yang sangat sensitif pada waktu itu, yakni “partai oposisi” yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid pada sebuah seminar dengan tema “Perspektif Islam dalam Indonesia Modern” pada 4 September 1995 di Jakarta. Dalam seminar tersebut Nurcholish Madjid menegaskan bahwa keberadaan partai oposisi dibutuhkan di Indonesia untuk menumbuhkan kehidupan demokrasi. Bagi Nurcholish Madjid, kehadiran partai oposisi akan mengefektifkan terjadinya kontrol serta *check and balance* dalam kehidupan bernegara.¹

Mungkin jika gagasan itu diungkapkan hari ini, nuansanya menjadi biasa-biasa saja. Tapi bayangkan, hal itu diungkapkannya

¹*Kompas*, 6 September 1995.

enam belas tahun silam, saat pemerintah Orde Baru sangat kuat dan represif. Pada zamannya ide tersebut menghentakkan jantung banyak orang, terutama mereka yang menggantungkan nasib politiknya pada Orde Baru. Presiden Soeharto sendiri saat ide itu mencuat ke permukaan secara tegas menolaknya. Presiden saat itu menegaskan bahwa partai oposisi tidak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dasar Negara Indonesia adalah semangat kekeluargaan dengan semangat musyawarah mufakat yang tidak mengenal oposisi.²

Dihadirkannya kembali artikel Nurcholish Madjid yang menyoal ide demokrasi, demokratisasi dan perlunya partai oposisi di Jurnal *Titik-Temu* ini sangatlah tepat mengingat sampai saat ini di era reformasi yang sudah berjalan selama tiga belas tahun berlalu, belum ada satu partai pun yang berani secara sengaja dan disiapkan secara konsepsional menjadi partai oposisi. Karena itu, ide-ide tentang perlunya partai oposisi seperti yang dituangkan dalam artikel ini dan sekaligus juga pernah mengemuka di Tanah Air, hemat saya, tetap mendapatkan porsi penting dan strategis dalam kehidupan berdemokrasi di negara kita. Hal penting lain — bahkan dalam pandangan saya lebih penting daripada ide-ide soal demokrasi dan partai oposisi tersebut — adalah sosok pribadi yang menjalankan makna dan filosofi dari yang diharapkan oleh ide tersebut. Memperhatikan perjalanan hidupnya, Nurcholish Madjid nampaknya cukup layak digolongkan sebagai orang yang secara konsisten menjalankan ide demokrasi dan oposisi itu. Bahkan dalam hal oposisi ini ia telah melakukannya jauh sebelum gagasan tersebut dikemukakannya.

Karena itu, tanggapan ini akan saya coba-arahkan pada sepak-terjang Nurcholish Madjid yang berhubungan dengan tindakan demokrasi dan oposisi seperti yang ditulisnya dalam artikel tersebut.

Awal tahun 1970, waktu Nurcholish Madjid menjadi Ketua Umum PB HMI periode kedua, ia diundang untuk ikut dalam

²*Kompas*, 8 September 1995.

sebuah pertemuan yang disponsori oleh harian *KAMI* yang dipimpin Nono Anwar Makarim dan majalah *Tempo* yang dipimpin Goenawan Mohamad. Pertemuan itu dimaksudkan untuk menggalang kekuatan mahasiswa menghadapi Pemilu 1971. Banyak orang waktu itu mengkhawatirkan Pemilu 1971 sebagai spekulasi besar yang akan membuat keadaan menjadi kacau. Apalagi sejak 1955 tidak pernah lagi ada Pemilu.

Suasana politik saat itu memang sangat menghantui banyak orang. Setiap orang merasa takut *dikambing-hitamkan* sebagai ekstrim kiri yang identik dengan PKI. Setiap orang juga merasa takut dikelompokkan sebagai ekstrim kanan yang identik dengan Masyumi atau unsur-unsur Islam lain yang berpikiran sepola dengan Masyumi. Terhadap PKI, sikap Presiden Soeharto waktu itu sangat jelas. Semua unsur-unsur PKI “dihabisi” dan menjadikannya sebagai musuh nomor *wahid* bagi Orde Baru. Terhadap Masyumi atau unsur-unsur Islam lain yang sepola dengan Masyumi, sikap Soeharto juga tidak kalah kerasnya. Secara sengaja Soeharto menunjukkan tidak mau diidentikkan sebagai Muslim yang saleh. Misalnya, ia tidak mau kelihatan melakukan sembahyang atau salat Jum'at. Ia hanya mengikuti acara-acara keagamaan yang bersifat kenegaraan, seperti peringatan hari-hari besar Islam, terutama Maulid Nabi. Ia juga tidak mengawali pidatonya dengan mengucapkan “*Assalamu 'alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh*,” karena pada waktu itu ucapan tersebut sudah cukup menjadi tanda bahwa orang yang bersangkutan adalah Muslim fanatik. Singkat kata, menjelang Pemilu 1971 semua orang ditakut-takuti akan adanya bahaya PKI melalui PNI, dan ancaman bahaya Masyumi melalui Parmusi.

Dalam suasana politik semacam itu, jelas banyak orang merasa risau jika tidak berpihak kepada Golkar. Saat itulah justru Nurcholish Madjid memiliki pemikiran yang berbeda dengan kebanyakan teman-temannya. Dalam pertemuan tersebut Nurcholish Madjid berpandangan bahwa Golkar pada Pemilu 1971 pasti akan menang. Mengapa? Karena Golkar didukung oleh 3M: *money*, *military*, dan *machine* (birokrasi). Karena itu, menurut Nurcholish Madjid, para pemuda dan mahasiswa seharusnya mendukung partai politik,

bukan mendukung Golkar, agar kekuatan partai relatif seimbang dengan kekuatan Golkar. Langkah ini diperlukan agar demokrasi bisa tumbuh sehat. Waktu itu — agak aneh memang — Golkar tidak (belum) digolongkan ke dalam partai politik.

Sebagian besar peserta pertemuan waktu itu jelas kaget mendengar pandangan Nurcholish Madjid semacam itu. Di antara mereka yang merasa kaget itu, adalah Adnan Buyung Nasution. Dengan gayanya yang khas, Bang Buyung berkata: “Aneh sekali Adik kita Nurcholish Madjid ini, *kok* malah mendukung partai!”³

Pandangan Nurcholish Madjid itu kemudian digempur oleh banyak kawannya. Mereka khawatir, dukungan kepada partai-partai hanya akan memperkuat apa yang waktu itu populer dengan sebutan “politik aliran.” Orang seperti Rahman Tolleng, Rachmat Witoelar, dan lain-lain beramai-ramai mendukung Golkar. Bang Buyung waktu itu malah sangat dalam keterlibatannya, sampai ikut berkampanye di Stadion Utama Senayan. “Seandainya saya bukan Ketua Umum PB HMI waktu itu, maka saya akan berkampanye untuk Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), partai yang paling dekat dengan aspirasi saya waktu itu,” aku Nurcholish Madjid.⁴

Atas dasar pemikiran diperlukannya kekuatan pengimbang dalam demokrasi itulah kemudian Nurcholish Madjid pada Pemilu 1977 terlibat mendukung dan berkampanye untuk kemenangan PPP. Banyak orang tidak memahami apa maksud di balik tindakan kampanye Nurcholish Madjid untuk PPP saat itu. Tidak sedikit orang mengecam Nurcholish Madjid sebagai orang yang tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri. Dulu (1970) Nurcholish Madjid mengeluarkan pernyataan penuh sihir “Islam, yes; Partai Islam, No”, tapi ternyata kini Nurcholish Madjid mengubah pendiriannya menjadi “Islam, yes; Partai Islam, yes”. Di sinilah

³Lihat *Demi Islam, Demi Demokrasi, Otobiografi Dr. Nurcholish Madjid*, selanjutnya disebut *Demi Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 138-39. Buku hasil wawancara dengan Nurcholish Madjid ini awalnya akan diterbitkan pada ulang tahun Nurcholish Madjid yang ke-60. Tetapi Nurcholish Madjid tidak menyetujuiinya. Proses wawancara dipimpin oleh Sdr. Ihsan Ali-Fauzi.

⁴*Demi Islam*, h. 141.

perlunya dikemukakan bahwa apa yang dilakukan Nurcholish Madjid adalah keberpihakan kepada partai politik yang lemah agar tidak terjadi adanya kekuatan politik dominan sehingga proses *check and balance* bisa dijalankan dengan efektif. Karena itu, tindakan demokrasi yang dilakukan Nurcholish Madjid tersebut oleh Mahbub Djunaedi dimetaforkan dengan istilah “memompa ban kempes.”⁵ Lagi-lagi Nurcholish Madjid mempertaruhkan diri dan kemampuannya untuk sebuah demokrasi yang sehat. Ia tidak berharap mendapatkan keuntungan politik dari PPP. Dan itu dibuktikannya setelah Pemilu 1977, ia berangkat ke Amerika untuk melanjutkan studinya.

Nurcholish Madjid sebenarnya melakukan apa yang biasa dilakukan para intelektual di negara-negara Barat sebagai langkah pemihakan kepada kaum pinggiran dan kelompok yang bakal kalah. Dengan kata lain, Nurcholish Madjid melakukan apa yang disebut *critical participation*, partisipasi kritis yang menentukan, demi mencapai keseimbangan. Dan untuk menguatkan apa yang telah Nurcholish Madjid lakukan itu, jauh setelah aktivitas kampanyenya itu berlalu, yakni sekitar 17 tahun kemudian, tepatnya pada 7 Februari 1994, dalam suatu seminar di LIPI, ia membuat makalah berjudul “Demokrasi, Demokratisasi dan Oposisi” yang ditampilkan dalam *Titik-Temu* ini. Makalah tersebut, menurut hemat saya, berisi pemaparan tentang makna dan hakikat demokrasi dan pentingnya oposisi loyal yang telah diperankannya jauh sebelum makalah itu dibuat. Dalam makalah tersebut Nurcholish Madjid menegaskan bahwa sebuah sistem politik disebut demokratis jika terdapat wujud dinamika pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*). Mengapa pengawasan, karena sebagai ideologi terbuka, demokrasi adalah sistem yang terbuka untuk semua pemeran-serta (partisipan), dan tidak dibenarkan untuk diserahkan kepada keinginan pribadi atau kebijaksanaannya, betapa pun *wasesa*-nya orang itu. Dan mengapa pengimbangan, karena sistem masyarakat dapat dikatakan sebagai demokratis hanya

⁵*Kompas*, 31 Oktober 1984.

jika terbuka kesempatan bagi setiap kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi, apa pun dan bagaimana pun caranya, dan tidak boleh dibiarkan adanya unsur sebagian yang mendominasi keseluruhan.⁶ Dengan penegasan tersebut, bagi Nurcholish Madjid, tidaklah bisa dibenarkan dalam alam demokrasi jika tidak terdapat partai politik oposisi. Dan partai oposisi yang dimaksudkan oleh Nurcholish Madjid adalah partai yang menjalankan ide *check and balance*, sehingga tidak berarti terus-menerus *to oppose*, tapi juga *to support*. Nurcholish Madjid mencontohkan di Amerika yang hanya ada partai pemerintah dan partai oposisi. Jika yang tengah berkuasa Partai Demokrat, maka yang menjadi oposisinya adalah Partai Republik. Demikian sebaliknya. Dan menariknya dalam beberapa hal sering terjadi koalisi-koalisi. Karena itu, tidak aneh jika terjadi sebagian orang-orang Partai Republik berpihak kepada suatu masalah yang kepadanya orang-orang Partai Demokrat juga memihaknya. Demikian juga sebaliknya. Namun itu semua dilakukan dengan inisiatif penuh dari orang-orang tersebut. Jadi, hal itu terjadi bukan masalah kebijakan golongan atau kelompok, melainkan inisiatif penuh sebagai wakil rakyat.⁷

Memperkuat pesan yang disampaikan bahwa Nurcholish Madjid tidak hanya berhenti pada ide dan gagasan demokrasi, demokratisasi dan oposisi, seperti yang dituangkannya dalam makalah di jurnal ini, tetapi ia juga secara sengaja dan penuh sadar terlibat dan aktif sebagai anggota Dewan Pertimbangan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) yang dideklarasikan pada 15 Maret 1996 oleh Goenawan Mohamad dan kawan-kawan. Keterlibatan dan aktifnya Nurcholish Madjid di KIPP saat itu tentu saja mengundang banyak tanda-tanya dan keheranan dari banyak orang. Bahkan keheranan itu datang dari para sahabatnya yang

⁶“Demokrasi, Demokratisasi dan Oposisi,” makalah untuk sebuah Seminar di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) pada Rabu, 7 Februari 1994, h. 6.

⁷“Oposisi bukan Berarti Menjatuhkan Pemerintah,” wawancara dengan Dr. Nurcholish Madjid, *Tirias* 1/ 34 (21 September 1995), h. 47-52.

tidak memahami peranan yang tengah dimainkan oleh Nurcholish Madjid. Tidak kurang dari seorang Din Syamsuddin secara tersirat mempertanyakan keterlibatan Nurcholish Madjid di KIPP tersebut. Hal itu terlihat pada acara yang diselenggarakan CPDS (Center for Policy and Development Studies) yang dipimpinnya, yang mengambil judul “Signifikansi KIPP bagi Pengembangan Demokrasi di Indonesia.” Acara tersebut digelar tiga minggu setelah deklarasi KIPP dilaksanakan. Dalam acara tersebut, nampaknya Din secara khusus meminta Nurcholish Madjid untuk menjelaskan keterlibatannya di KIPP. Hal itu terbaca pada surat Nurcholish Madjid untuk Din, mengingat Nurcholish Madjid kemudian tidak bisa menghadiri acara tersebut. Surat yang “Kepada Yang Terhormat”-nya ditujukan kepada Sdr. M. Din Syamsuddin yang berisi tiga halaman dengan satu spasi itu, antara lain berisi pandangan Nurcholish Madjid tentang apa itu KIPP sehingga ia kemudian terlibat di dalamnya. Terdapat sembilan pandangan Nurcholish Madjid tentang apa itu KIPP, dan sekaligus menjadi alasan bagi dirinya untuk terlibat di dalamnya.⁸ Kesembilan pandangan tersebut nampaknya perlu untuk dikemukakan mengingat butir-butir di dalamnya merupakan tindakan demokratis yang meniscayakan adanya sikap *check and balance*.

Kesembilan pandangan Nurcholish Madjid itu adalah sebagai berikut. *Pertama*, KIPP adalah suatu gerakan warga negara secara sukarela. Karena segi kesukarelaannya ini, KIPP memang dan dengan sendirinya berada di luar jalur resmi.⁹ Dalam pandangan saya, penegasan Nurcholish Madjid bahwa KIPP adalah gerakan sukarela dan berada di jalur tidak resmi merupakan prasyarat untuk menjaga agar KIPP bisa berperan secara independen dan nonpartisan.

⁸Pernyataan ini terdapat dalam surat Nurcholish Madjid untuk Din Syamsuddin berkenaan ketidak-hadirannya memenuhi undangan CPDS di acara dialog yang mengambil judul “Signifikansi KIPP bagi Pengembangan Demokrasi di Indonesia,” yang diselenggarakan di Jakarta pada 9 April 1996.

⁹Surat Nurcholish Madjid.

Kedua, KIPP dibentuk untuk ikut menumbuhkan tradisi demokrasi di negeri kita, namun tidak mengklaim sebagai satu-satunya gerakan serupa. Jadi juga tidak ada klaim sebagai “yang paling tahu” tentang demokrasi. Karena itu, selalu ditekankan adanya faktor ekperimentasi dengan kemungkinan salah dan benar.¹⁰

Ketiga, sebagai konsekuensi dari poin kedua di atas, dalam eksperimen demokrasi tersebut terdapat paham kenisbian. Justru demokrasi sering gagal karena para pendukung atau pejuangnya terjebak dalam paham kemutlakan (absolutisme).¹¹ Penegasan ini menunjukkan bahwa dalam alam demokrasi adalah kontradiktif dan ironis kalau ada orang atau kelompok memaksakan keinginan dan pendapat sendiri atas nama demokrasi.

Keempat, kita memulai semua langkah kita dengan titik-tolak *positive thinking*, dan menjauhi sikap-sikap konfrontatif. Kita memandang bahwa semua yang telah terjadi pada bangsa kita merupakan proses perkembangan dan pertumbuhan negara kita sebagai *nation state*, dengan unsur-unsur “coba dan salah” (*trial and error*) yang sangat wajar. Dalam proses-proses itu ada kegagalan-kegagalan, tapi juga banyak sekali keberhasilan-keberhasilan. Dengan ikut serta secara aktif-positif berusaha menumbuhkan demokrasi, maka kita berharap bahwa kegagalan dapat dicegah atau dikurangi, dan keberhasilan dapat diperkukuh dan diulang dengan mantap.¹²

Kelima, dalam rangka *positive thinking* itu, diyakini bahwa setiap komponen masyarakat Indonesia mempunyai peranan tersendiri yang mungkin unik dalam usaha-usaha menegakkan Demokrasi Indonesia, termasuk ABRI. Secara khusus ABRI perlu disebut, mengingat stereotip banyak orang bahwa ABRI adalah penghalang demokrasi. Tapi banyak contoh dari sesama negara berkembang, seperti Turki, Korsel dan Taiwan, di mana

¹⁰Surat Nurcholish Madjid.

¹¹Surat Nurcholish Madjid.

¹²Surat Nurcholish Madjid.

angkatan bersenjata adalah justru sponsor tangguh bagi proses-proses demokratisasi. Menurut Nurcholish Madjid, setelah banyak mengamati dan berkenalan dengan tokoh-tokoh ABRI, ternyata cukup banyak dari mereka yang mempunyai komitmen atau ikatan batin kepada demokrasi, dan pandangan-pandangan politik mereka cukup demokratis.¹³

Keenam, salah satu, dan yang paling penting, dalam alam demokrasi, atau sistem politik manapun, ialah adanya *presumed truth* sebagai premis awal yang darinya semua hal bertolak, karena tidak mungkin sesuatu dimulai dari titik nol. Bagi bangsa Indonesia, dengan sendirinya, *presumed truth* itu ialah Pancasila. Karena ABRI adalah lembaga yang paling efektif menjaga Pancasila, maka justru pelaksanaan tugasnya itu, yang disertai komitmen mereka sendiri sebagai pribadi-pribadi kepada nilai-nilai demokratis, merupakan sumbangan yang paling berharga untuk tegaknya kehidupan demokrasi di Indonesia.¹⁴

Ketujuh, masih berkenaan dengan ABRI, sumbangan besar lain ialah pelaksanaan tugasnya untuk memelihara kestabilan dan keamanan. Ini tanpa berarti mengabaikan “ongkos-ongkos” yang mesti kita bayar semua untuk tegaknya kestabilan dan keamanan itu, misalnya, ekses-ekses negatif “*security approach*.” Tidak ada yang cuma-cuma di muka bumi ini, “*there is no such thing as a free lunch*,” “*jer basuki mawa bea*,” “*bi qadr-i’l-kadd-i tuktasab-u’l-ma’ali*,” dan seterusnya. Dan kita tidak dapat *take for granted* kestabilan dan keamanan yang kita nikmati selama ini. Semuanya diperoleh dengan susah-payah dan penuh pengorbanan. Seperti dikatakan Bung Hatta dalam bukunya yang profetik, *Demokrasi Kita*, keadaan kacau karena salah melaksanakan demokrasi dan kebebasan akan mengundang lawan demokrasi dan kebebasan itu sendiri, yaitu tampilnya orang kuat untuk mengatasi kekacauan. Dan Bung Hatta terbukti benar, sangat benar.¹⁵

¹³Surat Nurcholish Madjid.

¹⁴Surat Nurcholish Madjid.

¹⁵Surat Nurcholish Madjid.

Kedelapan, karena itu, KIPP dalam pandangan Nurcholish Madjid, juga menurut para penggagasnya, tidak bermaksud “merusak” kembali aset-aset sosial-politik yang sudah di tangan sekarang ini. Paling jauh ialah mengusahakan perbaikan-perbaikan, sesuai dengan cita-cita kita semua, dengan memberdayakan rakyat umum untuk bereksperimentasi dengan demokrasi. Karena itu dampak yang diharapkan terbatas hanya kepada dampak moral. Jangankan dampak politik, dampak legal pun belum tentu didapatkan.¹⁶

Terakhir, yaitu *kesembilan*, karena itu, KIPP tidak berpretensi, dan mustahil dapat menjadi semacam Namfrel di Filipina, apalagi berdampak pengerahan “*people’s power*” yang revolusioner itu. Di sini juga sangat penting ditegaskan bahwa “masa bakti” KIPP hanyalah sekitar Pemilu, sampai sekitar akhir 1997. Setiap usaha menyimpangkan KIPP dari tujuan asalnya, seperti dikatakan Sdr. Mulyana pada saat deklarasi, tentu akan dihadapi dan diselesaikan *in due course*, sesuai kelaziman yang ada. Karena itu, setiap pendukung KIPP *has every right to withdraw his or her support whenever he or she finds it out of control and distracted from its original goal*.¹⁷

Tindakan demokrasi yang diperankannya sebagai pengimbang tersebut ternyata dilakukan Nurcholish Madjid tidak hanya pada ranah legal dan formal seperti diuraikan di atas. Dalam hal pemberian dukungan kepada institusi-institusi politik yang ada pun Nurcholish Madjid telah memperhitungkannya dengan dasar *check and balance* tersebut. Hal itu terlihat pada pengalaman penulis berikut ini. Suatu hari Nurcholish Madjid mendapat surat permohonan dari CSIS (*Center for Strategic and International Studies*) untuk menjadi salah satu pembicara. Acara itu bertempat di Bali. Panitia sudah menyiapkan hotel untuk bermalam Nurcholish Madjid sekaligus tiket pesawat yang sudah siap diantar ke kantornya. Secara *taken for granted* penulis berkeyakinan bahwa Nurcholish Madjid akan siap berangkat ke acara tersebut. Tapi ketika penulis

¹⁶Surat Nurcholish Madjid.

¹⁷Surat Nurcholish Madjid.

menyampaikan isi surat itu kepada Nurcholish Madjid, apa kata beliau? “Saya tidak bisa mengisi acara tersebut,” tegas Nurcholish Madjid. Penolakan yang dilakukan oleh Nurcholish Madjid tidak jelas alasannya. Sehingga waktu penulis menyampaikan penolakan Nurcholish Madjid kepada panitia, penulis pun merasa agak gugup. Kejadian itu terjadi sekitar awal tahun 1993.

Selang sekitar tujuh bulanan, surat permohonan serupa datang kembali kepada Nurcholish Madjid, hanya tempatnya tidak di Bali melainkan di Jakarta. Berdasarkan pengalaman yang lalu, penulis berkeyakinan bahwa Nurcholish Madjid tidak bersedia memenuhi permohonan tersebut. Tapi ketika penulis menyampaikan isi surat permohonan tersebut, justru yang terjadi di luar dugaan penulis. Nurcholish Madjid bersedia memenuhi permohonan dari CSIS itu. Dengan penuh keheranan, penulis melontarkan pertanyaan ringan kepada Nurcholish Madjid, yang dipanggil akrab Cak Nur: “*Kok* Cak Nur sekarang bersedia datang untuk memenuhi permohonan CSIS itu? Bukannya dulu Cak Nur tidak bersedia memenuhinya?” Apa jawaban Nurcholish Majid? “Begini Nafis, dulu saya tidak memenuhi permohonan CSIS itu karena waktu itu CSIS masih menjadi lembaga yang sangat kuat. Tapi sekarang saya bersedia memenuhi permohonan CSIS karena sekarang CSIS pamornya sudah terkalahkan oleh adanya CIDES (*Center for Information and Development Studies*) yang dilahirkan oleh ICMI pada 25 Januari 1993. Jadi sekarang saya bersedia memenuhi permohonan CSIS agar kekuatannya bisa mengimbangi CIDES.”

Pengalaman di atas memberikan pelajaran kepada penulis bahwa Nurcholish Madjid benar-benar merupakan seorang yang sejati dalam mengamalkan pengetahuan yang diyakininya benar. Beliau berulang-ulang menegaskan bahwa tidak boleh hanya ada satu kekuatan sosial-politik yang dominan di negeri ini sebab ia bisa menjadi semacam tiran. Karena itu diperlukan kekuatan pengimbang (*balancing force*). Jadi ide tentang pentingnya ada keseimbangan dalam kehidupan ini telah menjadi sikap hidup Nurcholish Madjid. Dan sikap itu diamalkannya secara universal,

tidak didasarkan pada kepentingan kelompok agama atau etnis tertentu.¹⁸

Inilah kira-kira yang bisa penulis tampilkan berkenaan dengan sosok Nurcholish Madjid yang telah memainkan peranan sebagai pengimbang demi sehatnya demokrasi di Indonesia. Tidak salah karenanya kalau penulis memberikan julukan kepada Nurcholish Madjid sebagai “Sosok Pribadi Pengimbang.” ❖

Muhammad Wahyuni Nafis adalah Ketua NCMS (Nurcholish Madjid Society) dan Principal Sekolah Madania di Parung, Bogor.

¹⁸Pengalaman penulis ini terdapat juga dalam Muhammad Wahyuni Nafis dan Achmad Rifki, penyunting, *Kesaksian Intelektual, Mengiringi Kepergian Sang Guru Bangsa* (Jakarta: Paramadina, 2005), h. 31-32.